

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

“Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional. Sektor pariwisata diharapkan dapat berperan sebagai sumber andalan pemasukan devisa, dan merupakan bidang yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan investasi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.”¹ Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

“Dunia pariwisata mulai disadari sebagai peluang baru di sektor bisnis dan perdagangan. Industri pariwisata mempunyai potensi yang cukup besar karena mendatangkan devisa yang besar bagi negara Indonesia. Hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan ekonomi negara dan dapat menunjang tingkat kesejahteraan hidup rakyat. Pengembangan kegiatan pariwisata secara umum bertumpu pada keunikan, kekhasan serta daya tarik wisata alam dan budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata perlu

¹Adenisa Aulia Rahma, *Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia*, Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 12 ,Nomor 1, 2020, hlm. 1.

adanya pengembangan dan pengelolaan yang baik pada potensi pariwisata. Pengelolaan potensi pariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pariwisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”²

“Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji terkait dengan pengelolaan pariwisata di Indonesia adalah Kota Jambi yang berada di Provinsi Jambi. Sebagai daerah yang menyimpan ragam lokasi wisata potensial yang perlu dikembangkan, dimana Pemerintah Kota Jambi juga memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan pariwisata di Kota Jambi agar terus maju dan berkembang, seperti beberapa objek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata sejarah budaya, wisata religi.”³ “Wisata alam yang terdapat di Kota Jambi antara lain yaitu objek wisata Danau Kenali, Danau Penyengat, Danau Teluk, Danau Sipin, Pantai Aurduri (Ancol), dan Taman Anggrek. Taman Hutan Kota, Tanggo Rajo, Jembatan Batanghari, Menara Gentala Arasy, Kampoeng Radja. Adapun objek wisata sejarah budaya di Kota Jambi antara lain wisata situs Solok Sipin, Rumah Tua, Kawasan Kota Lama, Tugu Juang, Bunker Jepang, Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Menara Air, Tugu Kota Baru, Jembatan Makalam. Dan wisata religi yang berada di Kota Jambi yaitu Makam Habib Husein Baraqbah, Makam Kuno Madrasah al Jauharein. Madrasah Nurul Islam, Madrasah Sa’adatuddarein, Madrasah Nurul Iman, Masjid Raya Magatsari, Masjid Agung Al-Falah, Taman Makam Rajo-Rajo,

² Suhendroyono, Rizki Novitasari, *Pengelolaan Wisata Alam Watu Payung sebagai Ikon Wisata Berbasis Budaya di Gunung Kidul Yogyakarta*, Jurnal Kepariwisata, 2016, Hlm 43.

³ Muchamad Zaenuri, *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: e-Gov Publishing, 2012, hlm. 4-5

Makam Pangeran Wirokusumo, Makam Raden Mat Theher dan Kleteng Hok Tek.”⁴

1.1.1 Kunjungan Wisatawan Provinsi Jambi Tahun 2021

Kabupaten / Kota		Jumlah Wisatawan	
		Nusantara	Mancanegara
1.	Kota Jambi	268.309	2.135
2.	Kabupaten Muaro Jambi	85.800	-
3.	Kabupaten Batang Hari	3.244	-
4.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	38.974	-
5.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	25.164	-
6.	Kabupaten Sarolangun	93.873	-
7.	Kabupaten Merangin	246.939	-
8.	Kota Sungai Penuh	10.639	-
9.	Kabupaten Kerinci	252.324	-
10.	Kabupaten Bungo	184.863	-
11.	Kabupaten Tebo	162.808	-
Jumlah		1.372.991	2.135

Sumber : Disbudpar Kab/Kota Provinsi Jambi, 2021

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah.”⁵ “Dalam pengelolaan Dinas Pariwisata membuat berbagai program untuk meningkatkan kualitas objek wisata sehingga memiliki daya tarik wisatawan yang kuat. Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.”⁶

Dinas Pariwisata juga dibantu oleh organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Adanya POKDARWIS dalam pengkoordinasian objek wisata berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁵ <http://eprints.uny.ac.id/21664/4/4%20BAB%20II.pdf>

⁶ <https://dispar.bone.go.id/2019/03/tugas-pokok-dan-fungsi-dinas-pariwisata-kabupaten-bone/#>

pada Pasal 28 mengenai kewenangan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata dimiliki masyarakat. POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan serta memiliki kepedulian dan tanggung jawab dengan berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.

“Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat. Pengembangan suatu objek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga.”⁷

Dalam PERDA No 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menyebutkan bahwa pembangunan destinasi pariwisata dapat memberikan dampak antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan serta melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan dan penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah penyediaan fasilitas umum melalui optimalisasi

⁷ Selly Ardianti, *Pengaruh Kunjungan Wisata terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Madewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember Tahun 2012-2015*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 09, No.1, 2017, Hlm 199.

fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah namun pada saat ini.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi pariwisata yaitu, memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata.

Taman Wisata Jambi dan Out Bound Kampoeng Radja, hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana pariwisata dan rekreasi di Jambi. Luas area Taman ini 8 Ha yang terletak di Jl. Lingkar barat No 108 Kenali Besar Jambi, tepatnya 400 m sebelah utara simpang rimbo atau 300 meter dari terminal Alam Barajo Jambi.

Taman ini merupakan tempat rekreasi keluarga, karena seluruh wahana maupun fasilitas dapat dinikmati oleh seluruh kalangan; mulai anak-anak, remaja, dewasa hingga usia lanjut.

Kampoeng Radja buka Sabtu – Kamis mulai pukul 08.00 hingga 15.30 WIB, khusus hari Jum'at tutup. Kampoeng Radja mulai dibuka untuk umum (soft opening) tanggal 1 April 2006. Saat pertama kali dibuka, wahana yang tersedia adalah :

“Tahun 2007 Wahana Renang (Jasmine water Park) mulai dibangun. Tahun 2008 Jasmine water Park dibuka untuk umum. Selanjutnya bulan Juni 2009 ada penambahan fasilitas seluncuran (water slide). Pada lebaran 2009, sudah ada penambahan wahana baru yaitu : go cart dan kereta api mini.

Fasilitas baru juga tersedia, yaitu parkir roda 4 dan parkir roda 2 yang lebih representative. Area parkir roda 4 sangat unik, karena pertama kali adanya di Jambi yaitu dibangun berundak (terasering).”⁸

Awal mula terbentuknya wisata kampoeng radja berawal dari sebuah tanah kosong yang luas. Tanah ini adalah milik bapak Ramli Jahil, Bapak ini mempunyai anak yaitu Ir. Petrie Ramli dan membuat ide ingin menggunakan tanah kosong menjadi menghasilkan sehingga muncul lah ide dengan membuat tempat wisata yaitu wisata Kampoeng Radja.

“Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata membuat suatu badan yang khusus untuk mengatur jalannya kegiatan promosi yaitu BPPI (Badan Promosi Pariwisata Indonesia). BPPI berkedudukan di ibukota negara dan merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri.”⁹ “BPPI mempunyai tugas yaitu : meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara serta meningkatkan penerimaan devisa dan pembelanjaan.”¹⁰

“Fungsi dari BPPI sendiri adalah sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah, dan mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”¹¹ Bertolak dari fungsi BPPI, maka kegiatan promosi pariwisata Kota Jambi menjadi kewenangan BP2KJ (Badan Promosi Pariwisata Kota Jambi). Kota Jambi memiliki banyak sekali daerah

⁸ <http://kampoeng-radja.blogspot.com/p/sekilas-kampoeng-radja.html>

⁹ Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Hal. 3

¹⁰ Rewold, *Strategi Promosi Pemasaran*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 1995), Hal. 24

¹¹ Rewold, *Strategi Promosi Pemasaran*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 1995), Hal. 25

tujuan wisata yang belum terpublikasikan dengan baik. Mungkin untuk sebagai wisatawan, yang terkenal dari Jambi hanyalah Kawasan Kampoeng Radja.

“Sejak munculnya era pandemi covid-19, perekonomian masyarakat hampir di semua negara di dunia mengalami kelumpuhan termasuk di Indonesia. Corona virus disease-19 (covid-19) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.”¹² “Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menghentikan aktivitas masyarakat, baik dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, wirausaha, transportasi, pariwisata, pendidikan dan banyak lagi sektor lain yang terkena imbasnya dari penerapan ini.”¹³

¹² Amin Kiswanto, et.al., “Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi *New Normal* Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Abdimas Pariwisata*, Vol, 1, No. 2, (2020) : 38

¹³ Mesran, et.al., *Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19* (Medan: Green Press (STMIK Budi Darma), 2020), 1

Tabel 1.1.2 Data Pasien Terkonfirmasi Covid 19

Tahun	Bulan	Jumlah	Tahun	Bulan	Jumlah
2020	Januari	0	2021	Januari	384
	Februari	0		Februari	246
	Maret	0		Maret	238
	April	9		April	345
	Mei	17		Mei	534
	Juni	5		Juni	996
	Juli	17		Juli	2884
	Agustus	53		Agustus	2280
	September	111		September	631
	Oktober	75		Oktober	78
	November	275		November	12
	Desember	414		Desember	5
Tahun	Bulan	Jumlah	Tahun	Bulan	Jumlah
2022	Januari	32	2023	Januari	9
	Februari	2159		Februari	2
	Maret	1695		Maret	4
	April	59		April	15
	Mei	14		Mei	80
	Juni	20		Juni	21
	Juli	45		Juli	3
	Agustus	141		Agustus	0
	September	110		September	0
	Oktober	114		Oktober	0
	November	139		November	0
	Desember	70		Desember	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi

Sektor pariwisata merupakan salah satu yang terdampak sangat besar dari kasus wabah virus Covid 19 ini, hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata. Bahkan Kampoeng Radja dinyatakan tutup untuk sementara waktu, bukan itu saja beberapa karyawan Kampoeng Radja terpaksa diberhentikan, karena adanya keputusan pemerintah untuk melakukan relaksasi ekonomi dan mengizinkan sektor pariwisata untuk beroperasi kembali, maka Kampoeng Radja kembali melakukan adaptasi-adaptasi.

Untuk menghindari Covid-19 dan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, maka Kampoeng Radja ternyata harus mengalami beberapa perubahan dan adaptasi. Kampoeng Radja tidak lagi membuka wahana permainan seperti dulu dan tidak menjual tiket harian. Kampoeng Radja berfokus menyediakan paket-paket berkunjung. Pengunjung akan terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat seperti keluarga, kantor, dan organisasi. Pengunjung akan ditempatkan secara terpisah untuk mengurangi penyebaran covid 19.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi selaku pihak yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola objek wisata Kampoeng Radja terus berupaya melakukan berbagai kegiatan diantaranya mempersiapkan segala fasilitas protokol kesehatan dan program sosialisasi untuk masyarakat setempat juga pelaku wisata untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tim Satgas Covid 19 Kampoeng Radja Jambi terlebih dahulu melakukan sterilisasi wahana permainan dengan menggunakan disinfektan, ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid 19, dan semua karyawan Kampoeng Radja telah dilakukan vaksinasi hingga pada dosis kedua.

Tatanan normal baru atau new normal adalah sebuah perubahan budaya hidup agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Tatanan hidup baru dengan kebiasaan baru setelah terjadinya pandemi covid-19 menjadi rancangan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian akibat dari

pandemi covid-19. Salah satu penggerak perekonomian suatu negara baik di negara berkembang maupun negara maju diluar migas adalah sektor Pariwisata.

“Pariwisata merupakan sektor penting dalam pergerakan perekonomian daerah dalam meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan peningkatan infrastruktur.”¹⁴ “Industri pariwisata perlu mempersiapkan new normal di masa pandemi covid 19. Protokol kesehatan wajib diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di beberapa wilayah, masyarakat telah memulai menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat lumpuh akibat diterapkannya sistem physical distancing. Industri pariwisata menyatakan bahwa mereka sudah siap menyambut new normal dengan mengedepankan beberapa prosedur baru.”¹⁵

“Adapun penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian penulis yang di buat oleh Sri Ayu Lestari pada tahun 2021 yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul strategi pemulihan ekonomi pariwisata di masa pandemi covid-19.”¹⁶ Jenis penelitian ini adalah metode Analisis data dalam penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing verification (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Mesran, et.al., *Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid-19*, 44

¹⁵ Amin Kiswantoro, et.al., “Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi *New Normal* Pasca Pandemi Covid-19”, 38.

¹⁶ Sri Ayu Lestari, 2021 :*Strategi Pemulihan Ekonomi Pariwisata di masa pandemi covid-19*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.

rencana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam pemulihan pariwisata Kota Mataram pada masa pandemi dapat meningkatkan ekonomi pariwisata Kota Mataram. Adapun kekurangan dari penelitian tersebut yaitu tidak merincikan anggaran yang diberikan secara khusus oleh pemerintah kepada Pemerintah Kota Mataram dalam pemulihan pariwisata di Kota Makasar.

“Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Salim pada tahun 2022 yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul inovasi pemerintah kota batu dalam pengembangan sektor pariwisata di masa pandemi covid 19 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.”¹⁷ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Batu telah upaya membangkitkan perekonomian dan pariwisata yang berada di Kota Batu dengan adanya promosi-promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Youtube dan melaksanakan berbagai Event seperti Sambang Kota, Festival Photography, Festival VLOG (Video Blog). Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu pemerintahan Kota Batu lebih memperhatikan lagi untuk pelaku kesenian agar tidak hanya masyarakat/sanggar tertentu yang bisa berpartisipasi di dalamnya.

“Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pitoy Veibyolla Nicolin, dengan judul Strategi Pemulihan Objek Wisata Raewaya Hills Di Kabupaten Minahasa Utara Selama Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode

¹⁷ Muhammad Salim, 2022 :*Inovasi Pemerintahan Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Masa Pandemi Covid 19* , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

deskriptif Kualitatif.”¹⁸ Hasil penelitian ini bahwa pihak pengelola telah menyediakan fasilitas dan atraksi wisata bagi wisatawan yang datang berkunjung dan akan berupaya untuk memulihkan kembali objek wisata ini. Wisatawan secara umum menyatakan fasilitas yang ada sudah baik, namun berharap agar dilakukan pelebaran terhadap jalan dan membuka kembali cafe dan wahana permainan. Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menjelaskan bagaimana sikap pemerintah atau sikap actor pemangku kebijakan dalam mengelola pemulihan Wisata Raewaya Hills Di Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan alasan dan judul penelitian diatas serta beberapa permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam pengangkatan permasalahan mengenai strategi pemulihan pariwisata di kampoeng radja setelah covid-19 di Kota Jambi dengan judul “Analisis Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Kota Jambi Pasca Covid 19 (*Studi Objek Wisata Kampoeng Radja*)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Kampoeng Radja Kota Jambi Pasca Covid 19?

¹⁸ Pitoy Veibyolla Nicolin, 2021 : *Strategi Pemulihan Objek Wisata Raewaya Hills Di Kabupaten Minahasa Utara Selama Pandemi Covid-19*, Fakultas Pariwisata, Universitas Katolik De La Salle Manado.

2. Bagaimana Strategi dan Upaya Yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Dalam meningkatkan Kunjungan Wisatawan Yang Ada di Wisata Kampoeng Radja Kota Jambi Pasca Covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam Pengelolaan Objek wisata di Kampoeng Radja Kota Jambi Pasca Covid 19
- b. Untuk mengetahui Strategi dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Kunjungan wisatawan yang ada di Kampoeng Radja Kota Jambi pasca Covid 19

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengembangan khazanah keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan serta menjadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata dalam pemulihan wisata Kampoeng Radja. Serta sebagai saran untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang telah didapat selama dibangku perkuliahan.

1.5 Landasan Teori

Teori menjadi payung penelitian dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Berikut teori yang peneliti gunakan untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan :

1. 5.1 Pengertian Peran

Peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Poerwadarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau 19 kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep

tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan Kota di Kota Jambi dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.

Menurut Siagian pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan setiap daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli tentang pengelolaan pariwisata, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan pariwisata yang di kemukan oleh Blakely: koordinator, fasilitator, stimulator, motivator.

1. Koordinator

Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan. Mencakup peran pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi di bidang

pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata.

2. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang di berdayakan dalam membangun pariwisata Dinas Pariwisata Kota Jambi bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengelola pariwisata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata menyediakan lahan untuk masyarakat sekitar objek wisata untuk tempat membuka usaha.

3. Stimulator

Menurut Blakely Stimulator adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun objek dan daya tarik wisata. Dinas kebudayaan dan daya tarik wisata menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk berjualan seperti kantin sehingga mendatangkan keuntungan baik untuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan.

4. Motivator

Dalam pembangunan pariwisata peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak lepas dari dukungan masyarakat ataupun pengusaha di bidang pariwisata.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan

(repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga- lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan

tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan

mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

3. Transisi Kenormalan Baru

“Setelah menerapkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mencegah penyebaran Corona Virus, saat ini

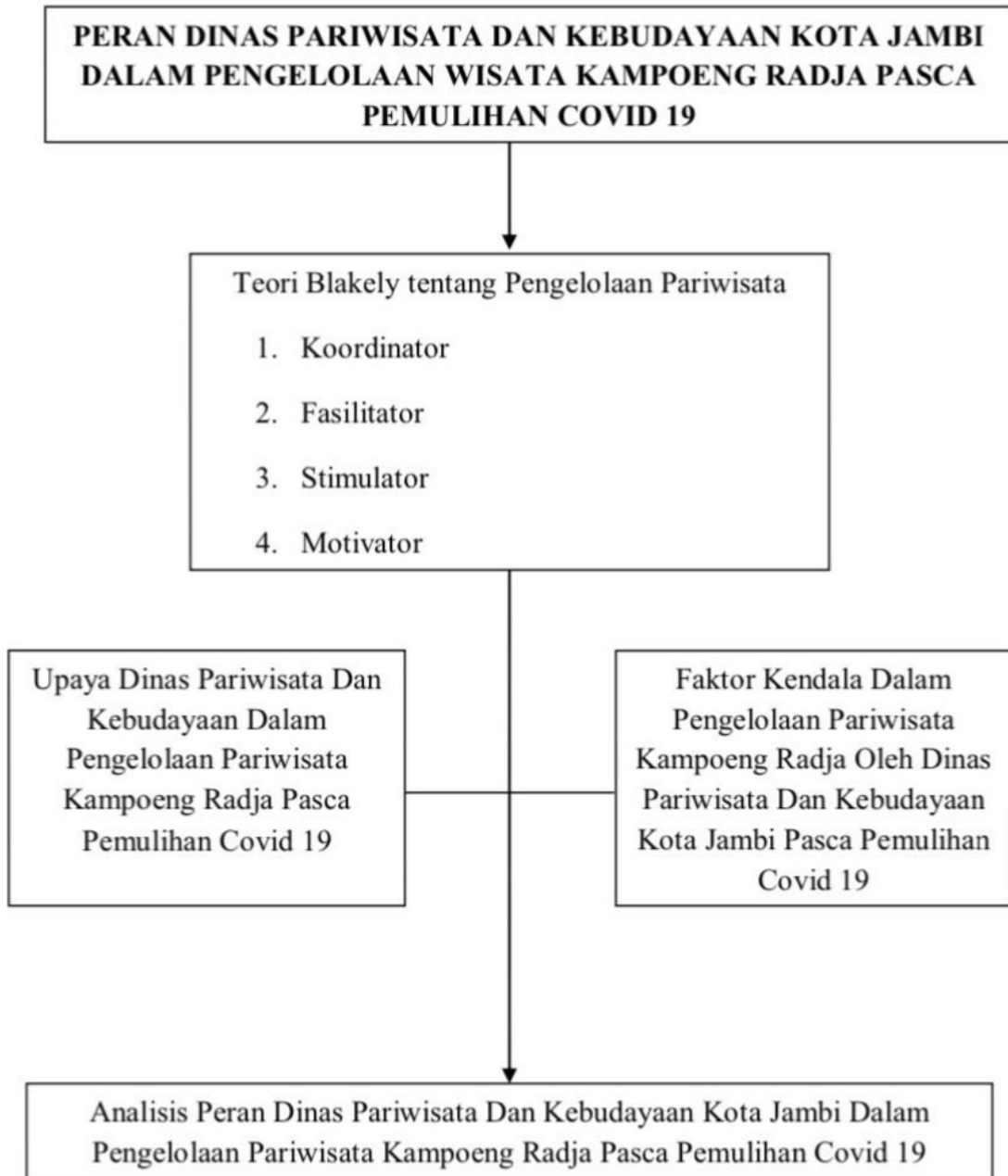
pemerintah secara bertahap mulai menerapkan masa transisi menuju tatanan normal baru (new normal). Untuk menyukseskan new normal ini, diperlukan kerja sama yang baik dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, pendidikan, kesehatan, maupun masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait diminta siap untuk menghadapi masa transisi ini. Selain dampak sosial dan kesehatan yang timbul akibat pandemi, bahaya keterpurukan ekonomi juga dinilai memiliki kedaruratan yang sama untuk ditanggulangi.”¹⁹

“Sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Bisnis pariwisata harus beradaptasi terhadap kondisi yang baru serta mengatur kembali strategi model bisnis agar bisa bertahan di era normal baru, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi.”²⁰

¹⁹Ivana Solemede, dkk, 2020 : *Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya Di Provinsi Maluku, Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan Vol. 1 No 1, Hlm 8*

²⁰ BM Lukita Grahadyarini, 2020, *Pariwisata Bersiap Hadapi Normal Baru Pasca Pandemi Covid 1*, <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/05/16/pariwisata-bersiap-hadapi-normal-baru/>, diakses 20 Agustus 2022.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

“Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”²¹

“Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.”²² Berdasarkan hal itu, untuk sempurnanya maka penelitian harus dilakukan secara holistik.

1.7.1 Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau pariwisata dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.”²³ “Penelitian kualitatif merupakan suatu

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 13

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1981, hlm 10.

²³ Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 328

strategi Inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang mengutamakan kualitas, dengan menggunakan beberapa cara dan disajikan secara naratif.”²⁴

1.7.2 Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan peneliti untuk meneliti yaitu bertempat di Wisata Kampoeng Radjo, Kota Jambi. Peneliti ingin terjun langsung ke lapangan untuk mencari jawaban dari pihak-pihak yang terkait.

1.7.3 Fokus Penelitian

“Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga harapannya dengan terfokus peneliti benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.”²⁵ Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus peneliti yang diperoleh setelah peneliti melakukan perjalanan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian mengenai Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Kota Jambi Pasca Covid 19.

²⁴ Ibid, Hlm. 329

²⁵ Fokus Penelitian, Sumber: <https://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian>

1.7.4 Sumber Data

“Secara umum terdapat dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen penelitian yang biasa meliputi : pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman pertanyaan (kuesioner)”²⁶. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada.

1.7.5 Teknik Penentuan Informasi

Teknik yang digunakan ialah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (rich information). Teknik ini akan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata Kampoeng Radja Kota Jambi pasca Covid-19. Informasi yang dipilih adalah :

- a) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Bapak Nanang Sunarya, S.Pd, M.Pd.
- b) Dinas Kesehatan Kota Jambi
- c) Pengelola Wisata Kampoeng Radja Ibu Eka Nila

²⁶ Pahrudin HM, dkk., Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan tanpa observasi karena fenomena telah lewat, diantaranya :

a. Wawancara

“Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (Interviewer) dan sumber informasi atau yang diwawancarai (Interviewee) melalui komunikasi langsung.”²⁷ “Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ; ini merupakan proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik .”²⁸

b. Dokumentasi

“Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan masih berhubungan dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif.”²⁹ Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Salah satu dokumen yang akan digunakan adalah dengan menggunakan penelitian atau karya ilmiah yang masih terkait dengan penelitian ini.

²⁷ A. Muri Yusuf, op.cit., hlm. 372.

²⁸ Imam Gunawan, op.cit., hlm. 160.

²⁹ A. Muri Yusuf, op.cit, hlm. 391.

1.1.7 Teknik Analisis Data

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”³⁰

“Sementara itu penjabaran lain, analisis data pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan melakukan kategorisasi sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.”³¹ Penelitian ini menggunakan tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (data reduction), paparan data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).

1.7.8 Keabsahan Data

“Menurut Mantja triangulasi dapat digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti wawancara dan dokumentasi atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan.”³² Variabel triangulasi yang peneliti gunakan

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 189.

³¹ Imam Gunawan, op.cit., hlm. 209.

³² Imam Gunawan, op.cit., hlm. 217-218.

adalah berdasarkan perolehan data wawancara dari unsur Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi Pengelola Wisata Kampoeng Radja. Triangulasi penulis gunakan dalam rangka memaksimalkan objektivitas penelitian.